

ABSTRAK

Reyhan Fakhreja El Ihsan (1228010181): Efektivitas Koordinasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mewujudkan Siregitas Keamanan di Kota Bandung

Keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bandung menghadapi tantangan kompleks akibat tingginya kepadatan penduduk dan dinamika sosial perkotaan. Kondisi tersebut menuntut koordinasi lintas lembaga antara Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kodim 0618/Kota Bandung, dan Polrestabes Bandung. Namun, dalam praktiknya koordinasi antarlembaga tersebut masih dihadapkan pada perbedaan kewenangan, ego sektoral, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya mekanisme komunikasi dan kesepakatan operasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi yang diterapkan antara Satpol PP, Kodim 0618/Kota Bandung, dan Polrestabes Bandung dalam penanganan keamanan di Kota Bandung. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana koordinasi antarlembaga tersebut mampu mewujudkan sinergitas keamanan daerah apabila diukur menggunakan indikator koordinasi menurut Taliziduhu Ndraha, yang meliputi informasi, komunikasi dan teknologi; kesadaran akan pentingnya koordinasi; kompetensi peserta; kesepakatan dan komitmen; penetapan kesepakatan; insentif koordinasi; serta umpan balik.

Kerangka berpikir penelitian ini menggunakan Teori Koordinasi Taliziduhu Ndraha (2011) yang memandang koordinasi sebagai proses manajerial pemerintahan dalam menyelaraskan tindakan antaraktor guna mencapai tujuan kolektif. Sinergitas keamanan dipahami sebagai hasil dari efektivitas proses koordinasi antarlembaga, yang dianalisis melalui tujuh indikator koordinasi Ndraha.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi. Data dianalisis secara sistematis dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12 untuk pengodean dan pemetaan tema, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber dan metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga keamanan di Kota Bandung telah berjalan secara operasional dan fungsional, terutama pada aspek informasi, komunikasi, dan kesadaran akan pentingnya koordinasi. Namun demikian, koordinasi tersebut masih bersifat situasional dan belum sepenuhnya terinstitusionalisasi, khususnya dalam aspek penetapan kesepakatan terpadu, insentif koordinasi, dan mekanisme umpan balik lintas lembaga. Oleh karena itu, penguatan koordinasi secara prosedural dan kelembagaan diperlukan untuk mewujudkan sinergitas keamanan yang berkelanjutan di Kota Bandung.

Kata Kunci: Kebijakan, Koordinasi, Sinergitas Keamanan, Lembaga Keamanan, Kebijakan Publik